

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

ANALYSIS OF LOCAL FINANCIAL CAPACITY IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY IN SOUTHEAST MALUKU DISTRICT WEST

Mersy Lenora Melalolin, Amran T. Naukoko, dan Agnes L. Ch. P. Lapian

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,

Universitas Sam Ratulangi, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : mersylenoramelalolin@yahoo.co.id

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah kabupaten Maluku tenggara barat dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2010 -2013. Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan APBD. Perhitungan APBD Kabupaten MTB dari tahun 2009-2013 memperlihatkan adanya surplus anggaran yang berfluktuasi. Dari tahun 2009-2013, kontribusi PAD terhadap APBD terus mengalami peningkatan. Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need) Kab.MTB yang menggambarkan seberapa besar kebutuhan perkapita penduduknya menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal Kab.MTB 61 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan standar se-Maluku. Kabupaten MTB masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort). Hasil perhitungan posisi fiskal Kabupaten MTB dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tertentu menunjukkan bahwa dengan menggunakan PDRB ADHK, laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten MTB.

Kata kunci : keuangan daerah, otonomi daerah

ABSTRACT

Regional autonomy is a first step towards national economic development more powerful high growth by providing a better life for people in the main area. characteristic which shows a region capable of autonomous is located on the financial capacity regions.while dependence on central government grants should be pursued as minimal. This study aims to determine the financial capacity of the western southeast Maluku district in the implementation of regional autonomy, especially in the year 2010 -2013. Results from this study is the growth of the budget. Calculation MTB district budget from 2009 to 2013 show a surplus budget that fluctuates. From the year 2009-2013, the contribution of PAD to APBD continues to peningkatan. Needs Fiscal (Fiscal Need) District. MTB which describes how much needs per capita of the population indicates that the fiscal needs of the district. MTB 61 times more greater than the average standard needs throughout Maluku. Capacity Fiscal (Fiscal Capacity) MTB district still has a dependency on the government's fiscal .center / Position Fiscal (Tax Effort). The result of the calculation of the fiscal position MTB District with elasticity coefficient PAD to the GDP with average growth for a certain period shows that using ADHK the GDP, the rate of growth PDRB affect the increased effectiveness of PAD MTB.

Keywords: Local Financial

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih berdaya tumbuh tinggi dengan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di daerah. Asas yang menjadi prinsip dasar otonomi adalah otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab. Prinsip ini memperhatikan aspek demokrasi, partisipasi, adil dan merata dengan tetap memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Berdasarkan asas tersebut, diharapkan otonomi daerah mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan masyarakat memang menjadi tujuan utama dari kebijakan otonomi sebagaimana tuntutan pada saat reformasi digulirkan. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud dengan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Otonomi daerah yang sudah berjalan 9 tahun ini telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan perubahan-perubahan tersebut telah membuktikan bahwa pembenahan sistem pemerintahan daerah terus berjalan dinamis seiring dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut pada dasarnya pemerintah menerapkan prinsip *money follow function*/uang mengikuti fungsi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan suatu daerah dalam bidang keuangan. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh mana daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhan keuangan daerahnya tanpa harus menggantungkan diri pada bantuan dana dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih tinggi.

Bagaimana kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2010-2013 ?

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2010-2013.

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta pelaksanaan otonomi daerah.

Tinjauan Pustaka

Kaho (1998) dalam Safi'i (2007) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Ateng Safrudin dalam Winarna Surya Adi Subrata (2003), istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas

kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, artinya kebebasan yang terbatas, kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah pusat). Jadi secara umum otonomi daerah itu mencakup tiga pengertian: 1) Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, 2) Wewenang untuk mengatur daerah sendiri, 3) Kewajiban untuk mengatur rumah tangga sendiri. Produk perundang-undangan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut (Winarna Surya Adi Subrata, 2003): Undang-Undang No. 1 Tahun 1945, Undang-Undang No. 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959, Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1960, Undang-Undang No. 18 Tahun 1965, Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004.

Kebijakan pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. (Mardiasmo, 2002).

Suatu daerah yang otonom, harus mempunyai kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan pemerintahan Daerah yang telah mandiri ditandai dengan berkurang ketergantungan keuangan terhadap Pusat. Dengan demikian tujuan otonomi daerah bias terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Meningkatkan PAD merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD maka semakin besar kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi.

Kemampuan Keuangan Daerah adalah kewenangan dan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai peyelenggaraan pemerintahannya. Kemampuan keuangan daerah dicerminkan dengan kemandirian keuangannya. Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam mendanai belanja daerah dari kemampuan sendiri, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis, yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan / memisahkan komponen / bagian yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. (Mudrajad Kuncoro, 2003) Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan melihat pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka. (Mudrajad Kuncoro, 2003) Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah serta kesiapan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

➤ **Mencapai Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat maka digunakan beberapa indikator kemampuan keuangan daerah yang terdiri dari: Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Untuk mengukur Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah digunakan formula sebagai berikut (Sukanto Reksohadiprojo, 2001):

$$DDF1 = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

$$DDF2 = \frac{BHPBP}{TPD} \times 100\%$$

$$DDF3 = \frac{SBD}{TPD} \times 100\%$$

Dimana:

- TPD = PAD + BHPBP + SBD
- DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- SBD = Sumbangan dan Bantuan Daerah
- TPD = Total Penerimaan Daerah
- Ukuran DDF = 50%

Jika nilai DDF > 50%, maka daerah dikatakan semakin mandiri dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil (kecuali DDF3).

Sebaliknya jika nilai DDF < 50%, maka daerah dikatakan belum cukup mandiri karena ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi (kecuali DDF3).

- **Derajat Otonomi Fiskal (DOF)**

Pengukuran Derajat Otonomi Fiskal menggunakan formula (Adrianus Dwi S, 2008):

$$DOF = \frac{Pajak + Retribusi daerah}{Total belanja daerah} \times 100\%$$

- **Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need/KbF)**

Penghitungan Kebutuhan Fiskal suatu daerah dilakukan dengan menghitung Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) dengan formula (Sukanto Reksohadiprojo, 2001):

$$SKbFMTB = \frac{Jml \text{Pengeluaran MTB} / Jml \text{Penduduk MTB}}{Jml \text{Kecamatan}}$$

$$KbFSKA = \frac{SKbFMTB}{PPP}$$

Dimana

SkbFMtb= Rata-rata Kebutuhan Fiskal Standart se-Maluku Tenggara Barat

KbFSKA = Kebutuhan Fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat

PPP = Jumlah Pengeluaran Rutin dan Pembangunan masing-masing daerah/pengeluaran aktual perkapita untuk jasa publik.

Semakin tinggi hasilnya, maka kebutuhan fiskal suatu daerah juga semakin besar.

- **Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity/KaF)**

Kapasitas fiskal dapat dihitung dengan cara (SukantoReksohadinprojo,2001):

$$SKaFMTB = \frac{PDRBHMTB/JmlPendudukMTB}{JmlKecamatan}$$

$$KaFSKA = \frac{PDRBHBSKA/JmlPendudukSKA}{SkaFMalukuTenggaraBarat}$$

SkaF Maluku Tenggara Barat =Rata-rata Kapasitas Fiskal Standart se-MTB

KaFSKA = Kapasitas Fiskal Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Semakin tinggi hasilnya, maka kapasitas fiskal (daya tumbuh keuangan) suatu daerah semakin besar.

- **Upaya / Posisi Fiskal (Tax Effort)**

Upaya/Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD di daerah tersebut semakin baik. (Abdul Halim, 2004)

$$\text{Elastisitas PAD} = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas PAD

Perhitungan Efektivitas PAD menggunakan rumus(Abdul Halim, 2004):

$$\text{RasioEfektivitas} = \frac{\text{RealisasiPAD}}{\text{TargetPAD}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio efektivitas maka kemampuan daerah semakin baik.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

a. PDRB

PDRB adalah jumlah nilai tambahbruto yang dihasilkan seluruh unitusaha dalam wilayah tertentu,atau merupakan jumlah nilaibarang dan jasa akhiryang dihasilkan oleh seluruh unitekonomi. PDRB atas dasar harga berlakumenggambarkan nilai tambahbarang dan jasa yang dihitungdengan menggunakan harga padasetiap tahun, sedangkan PDRBatas dasar harga konstanmenunjukkan nilai tambah barangdan jasa yang dihitungmenggunakan harga pada satutahun tertentu sebagai tahundasar penghitungannya. PDRBatas dasar harga berlaku dapatdigunakan untuk melihatpergeseran struktur ekonomi,sementara harga konstan dapatdigunakan untuk mengetahuipertumbuhan ekonomi dari tahunke tahun.PDRB Kabupaten

Maluku Tenggara Barat berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan beserta indikator-indikator lain yang terkait dapat dilihat dari Tabel 4.1. sampai dengan Tabel 4.12 berikut ini.

Tabel 4.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlakudan Atas Dasar Harga Konstan
2000 Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten MTB, 2009-2013

Harga Berlaku						Harga Konstan					
Lapangan Usaha Industri Origin	2009	2010	2011	2012	2013 ⁽¹⁾	Lapangan Usaha Industri Origin	2009	2010	2011	2012	2013 ⁽¹⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Perburuan / Agriculture, Livestock, Forestry & Hunting	274.484	303.380	325.009	376.116	425.121	I. Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Perburuan / Agriculture, Livestock, Forestry & Hunting	121.907	153.204	163.852	171.451	182.704
II. Pertambangan & pengalihan / Mining & Quarrying	4.497	5.585	6.147	7.145	8.123	II. Pertambangan & pengalihan / Mining & Quarrying	2.147	2.374	2.584	2.778	2.926
III. Industri Pengolahan / Manufacturing Industry	2.024	2.022	3.479	4.014	4.176	III. Industri Pengolahan / Manufacturing Industry	1.410	1.501	1.670	1.765	1.842
IV. Listrik & Air Panas / Electricity & Water Supply	2.258	2.381	2.589	2.782	2.909	IV. Listrik & Air Panas / Electricity & Water Supply	909	1.027	1.071	1.098	1.137
V. Bangunan / Construction	8.269	12.542	15.413	18.013	21.420	V. Bangunan / Construction	4.276	6.510	7.520	7.918	8.580
VI. Perdagangan, Hotel & Restoran / Trade, Hotel & Restaurant	114.035	132.104	156.119	185.810	216.946	VI. Perdagangan, Hotel & Restoran / Trade, Hotel & Restaurant	59.510	62.810	66.027	74.628	76.577
VII. Pengangkutan dan Komunikasi / Transport & Communication	8.071	8.248	10.450	11.840	13.121	VII. Pengangkutan dan Komunikasi / Transport & Communication	4.522	4.050	5.050	5.363	6.040
VIII. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan / Finance, Real Estate, Business & Services	20.743	22.615	25.059	28.001	32.762	VIII. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan / Finance, Real Estate, Business & Services	13.212	13.527	14.059	14.717	16.446
IX. Jasa-jasa / Services	32.942	61.211	79.971	87.695	110.201	IX. Jasa-jasa / Services	32.542	34.116	36.288	40.210	41.736
PDB / GDP	487.685	541.487	623.717	739.105	814.911	PDB / GDP	271.902	355.308	390.517	423.012	460.010

Catatan/Note : (1) Angka sementara / Preliminary figures
Sumber : Badan Pusat Statistik

b. Pertumbuhan APBD Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah untuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5 Pendapatan asli daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat semakin meningkat, dengan sumber penerimaan terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Daerah Menurut Jenis Penerimaan di Kabupaten MTB (Miliar Rupiah), 2009-2013

Jenis Penerimaan / Kind of Revenues	2009	2010	2011	Jenis Penerimaan / Kind of Revenues	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Regional Original Income	58,50	89,75	85,46	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) / Regional Original Income	14,29	21,54
a. Pajak Daerah / Regional Taxes	1,96	1,12	1,69	a. Pajak Daerah / Regional Taxes	2,51	3,57
b. Retribusi Daerah / Regional Retribution	3,31	3,14	2,14	b. Retribusi Daerah / Regional Retribution	3,08	5,33
c. Bagian Laba BUMD / Profit Transfer from Regional SOE's	0,13	0,23	0,20	c. Bagian Laba BUMD / Profit Transfer from Regional SOE's	0,00	0,00
d. Penerimaan Lain-lain / Other Revenues	53,10	85,26	81,44	d. Penerimaan Lain-lain / Other Revenues	8,70	12,54
2. Dana Perimbangan / Balancing Funds	327,35	346,92	399,09	2. Dana Perimbangan / Balancing Funds	411,22	509,52
a. Bagi Hasil Pajak / Tax Revenues Sharing	21,66	14,34	26,74	a. Bagi Hasil Pajak / Tax Revenues Sharing	26,72	21,59
b. Bagi Hasil Bukan Pajak / Nontax Revenues Sharing	2,55	6,57	3,50	b. Bagi Hasil Bukan Pajak / Nontax Revenues Sharing	2,70	3,62
c. Dana Alokasi Umum (DAU) / Center Allocation Funds	243,89	287,10	318,08	c. Dana Alokasi Umum (DAU) / Center Allocation Funds	367,50	412,15
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) / Specific Allocation Funds	59,24	38,91	50,77	d. Dana Alokasi Khusus (DAK) / Specific Allocation Funds	45,27	68,15
3. Pinjaman Daerah / Regional Loan	0,00	0,00	0,00	3. Pinjaman Daerah / Regional Loan	34,02	0,00
4. Bantuan/Hibah / Grants	6,96	0,00	0,00	4. Bantuan/Hibah / Grants	0,00	43,34
5. Penerimaan Pembiayaan Publik / Public Cost Revenue	86,62	30,73	20,78	5. Penerimaan Pembiayaan Publik / Public Cost Revenue	22,32	33,14
Jumlah / Total	479,45	467,41	515,33	Jumlah / Total	511,85	600,54

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Tabel 6. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten MTB (Miliar Rupiah), 2009-2013

Jenis Pengeluaran Kind of Expenditures	2009	2010	2011	Jenis Pengeluaran Kind of Expenditures	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Aparatur Daerah / Regional Governments Expenditures	418,99	418,68	424,19	1. Pengeluaran Aparatur Daerah Regional Governments Expenditures	438,33	491,20
a. Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	165,13	192,82	218,60	a. Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	257,29	273,30
b. Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	57,76	51,10	56,29	b. Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	65,02	70,84
c. Belanja Modal / Capital Expenditures	165,57	145,62	116,91	c. Belanja Modal / Capital Expenditures	82,42	106,67
d. Belanja Perjalanan Dinas / Official Tour Expenditures	29,52	27,93	31,24	d. Belanja Perjalanan Dinas / Official Tour Expenditures	33,61	40,06
e. Belanja Pemeliharaan / Care Expenditures	1,01	1,20	1,16	e. Belanja Pemeliharaan / Care Expenditures	0,00	0,34
2. Pengeluaran Pembiayaan Publik / Public Costing Expenditure	7,79	3,13	14,66	2. Pengeluaran Pembiayaan Publik / Public Costing Expenditure	10,51	17,99
3. Belanja Lainnya / Other Expenditures	21,93	24,81	54,15	3. Belanja Lainnya / Other Expenditures	24,87	25,56
4. SILPA	30,73	20,78	22,32	4. SILPA	38,14	74,79
Jumlah / Total	479,45	467,41	515,33	Jumlah / Total	511,85	609,54

Sumber : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Makuu Tenggara Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat dari tahun ke tahun pendapatan Kota Surakarta terus mengalami peningkatan. Peningkatan pendapatan ini terkadang juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah belanja daerah sehingga surplus/defisit daerah juga berfluktuasi.

2. Analisis Kuantitatif

a. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab II dan III, penghitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dapat dilakukan dengan menggunakan tiga (3) formula, yakni rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD), rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) dengan TPD dan rasio Sumbangan dan Bantuan Daerah (SBD) dengan TPD.

Jika hasil rasio antara PAD dengan TPD maupun BHPBP dengan TPD lebih dari 50% maka kemampuan keuangan daerah dapat dikatakan semakin baik/mandiri. Sebaliknya jika nilainya kurang dari 50% maka kemampuan keuangan daerah dikatakan belum mandiri. Sedangkan untuk rasio antara SBD dengan TPD, jika nilainya lebih dari 50% berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat semakin tinggi. Tetapi jika kurang dari 50% maka tingkat ketergantungan finansial terhadap Pemerintah Pusat berkurang.

Tabel. 7. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten MTB Tahun 2009- 2013

Tahun	DDF(%)		
	PAD/TPD	BHPBP/TPD	SBD/TPD
2009	58,50	29,21	6,98
2010	89,75	20,91	0
2011	95,46	30,24	0
2012	14,29	28,45	34,02
2013	21,54	26,21	43,34
Rata-rata	55,91	27,004	16,87

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder

Dari tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa rasio PAD terhadap TPD terus meningkat dari tahun 2009 sampai tahun 2013, akan tetapi mengalami penurunan sampai dengan tahun 2012. Hasil rasio PAD terhadap TPD tertinggi adalah di tahun 2011 dengan nilai sebesar 95,46%, dan yang terendah adalah di tahun 2012 dengan nilai sebesar 14,29%. Jika dilihat secara rata-rata, hasil rasionya adalah 55,91%. Dengan naik turunnya nilai rasio PAD terhadap TPD ini dan berdasarkan reratanya dari tahun 2009-2013, menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Kabupaten MTB dapat dikatakan sudah cukup mandiri.

Untuk rasio BHPBP terhadap TPD, sama seperti rasio PAD terhadap TPD yang telah disebutkan sebelumnya, nilai maksimalnya adalah pada tahun 2011 sebesar 30,24%. Sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2010 sebesar 20,91%. Secara rerata dari tahun 2009-2013, hasil rasio BHPBP terhadap TPD adalah sebesar 27,004%. Dengan nilai yang masih kurang dari 50% maka dapat dikatakan kemampuan keuangan Kabupaten Maluku Tenggara Barat belum mandiri.

Adapun hasil perhitungan DDF yang ketiga, yakni rasio antara SBD terhadap TPD, nilai tertingginya adalah 43,34% pada tahun 2013 dan nilai terendah 72,34% pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan untuk rata-ratanya dari tahun 2009-2013, hasil rasio menunjukkan angka 16,87%. Karena nilainya yang berada dibawah 50%, maka hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sudah kurang tergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga tingkat desentralisasi fiskalnya sudah cukup besar dan bisa dikatakan sudah mulai mandiri.

b. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemandirian keuangan daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2004).

Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten MTB dihitung dengan menggunakan rasio antara bagian PAD (pajak daerah + retribusi daerah) dengan total belanja daerah.

Tabel 8. Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten MTB Tahun 2009-2013

Tahun	DOF (%)
2009	5,27
2010	4,26
2011	3,83
2012	5,59
2013	9
Rata-rata	5,59

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa besarnya DOF Kabupaten Maluku Tenggara Barat tertinggi adalah pada tahun 2013 sebesar 9% dan yang terendah pada tahun 2011 dengan nilai 3,83%. Secara rerata, besarnya DOF Kabupaten MTB adalah 5,59%. Hal ini berarti kecenderungan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat masih rendah.

c. Kebutuhan Fiskal (Fiscal Need)

Kebutuhan Fiskal menggambarkan seberapa besar kebutuhan per kapita penduduk jika jumlah seluruh pengeluaran dibagi secara adil kepada seluruh penduduk daerah tersebut. Kebutuhan Fiskal juga menunjukkan besarnya indeks pelayanan publik per kapita.

Kebutuhan Fiskal Kabupaten MTB dan Provinsi Maluku dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 9. Kebutuhan Fiskal (KbF) Se-Provinsi Maluku dan Kabupaten MTB Tahun 2009-2013

Tahun	Kebutuhan Fiskal Standar se-Maluku (SKbF Maluku)	Kebutuhan Fiskal Kab. MTB (KbF MTB)
2009	11,257,75	62,88
2010	9,571,69	67,16
2011	11,235,61	56,63
2012	15,215,41	60,30
2013	19,872,18	57,44
Rata-rata	13,430,52	60,88

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder

Dari tabel 9 terlihat bahwa dari tahun 2009-2013 rata-rata kebutuhan fiskal standar se Provinsi Maluku adalah sebesar Rp. 13.430,52. adapun kebutuhan fiskal Kabupaten MTB sebesar 60,88. hal ini menunjukkan Indeks Pelayanan Publik Perkapita (IPPP) Kabupaten MTB adalah sebesar

60,88 dan kebutuhan fiskal Kabupaten MTB 61 kali lebih besar dari rata-rata kebutuhan standar se- Maluku.

d. Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity)

Kapasitas Fiskal menunjukkan berapa besar usaha dari daerah yang diwujudkan dalam PDRB untuk memenuhi semua kebutuhannya, dalam hal ini adalah total pengeluaran daerah. Hasil dari indeks Kapasitas Fiskal menunjukkan seberapa besar hasil yang didapatkan oleh setiap penduduk dalam setiap daerah.

Hasil perhitungan Kapasitas Fiskal Kabupaten MTB dan Provinsi Maluku pada tabel 4.12 berikut

Tabel 10. Kapasitas Fiskal (KaF) Se-Maluku dan Kabupaten MTB Tahun 2009-2013

Tahun	Kapasitas Fiskal Standar se-Maluku (SKbf Maluku)	Kapasitas Fiskal Kab. MTB (Kbf MTB)
2009	153,212,97	55,81
2010	170,591,36	54,60
2011	203,536,50	51,34
2012	250,392,08	48,20
2013	275.678.21	48,63
Rata-rata	210.682,22	51,72

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata kapasitas fiskal standar se-Maluku dari tahun 2009-2013 adalah Rp 210.682,22. Sedangkan kapasitas fiskal standar Kabupaten MTB sebesar 51,72. Bila dibandingkan, Kota Surakarta memiliki kapasitas fiskal yang lebih kecil dibanding kebutuhan fiskalnya (51,72 : 60,88). Selisih kurang ini diharapkan dapat ditutup melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat.

e. Upaya/Posisi Fiskal (Tax Effort)

Posisi Fiskal suatu daerah dihitung dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tertentu.

Tabel 11. Pertumbuhan PAD dan PDRB Kabupaten MTB Tahun 2009-2013

Tahun	Pertumbuhan (%)		
	PAD	PDRB ADHK	PDRB/ADHB
2009	58,50	5,51	10,87
2010	89,75	5,12	11,04
2011	95,46	5,25	15,19
2012	14,29	7,34	17,86
2013	21,54	5,26	13,58
Rata-rata	55,91	5,69	13,71

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder

Berdasarkan tabel 11 dapat dihitung elastisitas PAD terhadap PDRB sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

- Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHK = $55,91/5,69 = 9,82$

- Elastisitas PAD terhadap PDRB ADHB= $55,91/13,71 = 4,07$

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa dengan menggunakan PDRB ADHK, laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD meskipun hanya kecil, yaitu bila PDRB meningkat 1% maka PAD akan meningkat sebesar 9,82%. Sedangkan bila menggunakan PDRB ADHB, laju pertumbuhan PDRB juga hanya sedikit berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yaitu apabila PDRB naik 1% maka PAD akan meningkat sebesar 4,07%.

f. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD berdasarkan target yang telah ditetapkan sebelumnya, yang disesuaikan dengan potensi riil daerahnya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikategorikan efektif bila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik pula.

Tabel 12. Rasio Efektivitas PAD Kab. MTB Tahun 2009-2013

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Ush Daerah	Lain-Lain PAD
2009	1,96	3,31	0,13	53,10
2010	1,12	3,14	0,23	85,26
2011	1,69	2,14	0,20	91,44
2012	2,51	3,08	0,00	8,70
2013	3,67	5,33	0,00	12,54
Rata-rata	2,19	3,4	0,11	50,20

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder

Tabel 12 menunjukkan bahwa secara rerata dari tahun 2009-2013, bagian penyusun PAD Kabupaten MTB yang dapat dikategorikan efektif adalah dari sumber pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah. Dikategorikan efektif karena rasio antara realisasi dengan target yang ditetapkan pada sumber pendapatan pajak daerah adalah sebesar 2,19% dan retribusi daerah, 3,4% serta sumber pendapatan lainnya sebesar 50,20%. Adapun bagi hasil laba usaha daerah belum dapat dikategorikan efektif karena rasio efektivitasnya hanya mencapai 0,11%.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Pertumbuhan APBD. Perhitungan APBD Kabupaten MTB dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 memperlihatkan adanya surplus anggaran yang berfluktuasi. Dari tahun 2009-2013, kontribusi PAD terhadap APBD terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan semakin besarnya kontribusi selain PAD dalam menyumbang pendapatan daerah, misalnya saja bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah yang lebih tinggi.
- Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Dari perhitungan DDF, yakni rasio antara PAD, BHPBP dan SBD terhadap TPD, menunjukkan bahwa secara rerata dari tahun 2009-2013 nilai

- kontribusi SBD terhadap TPD lebih dominan, dan mengindikasikan adanya upaya kemandirian dari pihak pemerintah Kabupaten terhadap keterlibatan Pemerintah Pusat
- Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten MTB yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah MTB dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif dari tahun 2009 sampai dengan 2013.
 - Kebutuhan Fiskal (*Fiscal Need*) Kab. MTB yang menggambarkan seberapa besar kebutuhan perkapitapenduduknya menunjukkan bahwa kebutuhan fiskal Kab. MTB 61 kalilebih besar dari rata-rata kebutuhan standar se-Maluku.
 - Kapasitas Fiskal (*Fiscal Capacity*) Kabupaten MTB masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.
 - Upaya/Posisi Fiskal (*Tax Effort*). Hasil perhitungan posisi fiskal Kabupaten MTB dengan mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB dengan rataratapertumbuhan selama kurun waktu tertentu menunjukkan bahwa dengan menggunakan PDRB, ADHK, laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD Kabupaten MTB.
 - Rasio Efektivitas PAD. Berdasarkan reratanya, pos-pos bagian penyusun PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah, dapat dikategorikan efektif karena rasio antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai.

Saran

Dari hasil kesimpulan yang telah diuraikan di atas, saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- Upaya pengoptimalan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang potensial masih sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan eksistensi kemandirian daerah MTB, khususnya dalam bidang fiskal.
- Menciptakan daya tarik dan iklim yang kondusif bagi investor baik lokal maupun asing guna menanamkan modalnya di MTB sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatnya PDRB. Jika PDRB meningkat, maka pendapatan perkapita masyarakat meningkat dan akhirnya berdampak pada meningkatnya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak.
- Perusahaan daerah (BUMD) yang merupakan salah satu sumber pemasok dana ke kas daerah harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kontribusinya bagi PAD juga akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Ana Dwi Kurniawati. 2004. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah di Kabupaten Sukoharjo (Perbandingan Era Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah)". *Skripsi FE UNS Surakarta*. Tidak dipublikasikan.
- Abdul Halim dan Theresia Damayanti. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Adrianus Dwi Siswanto. 2008. "Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Derajat Otonomi Pemerintahan Propinsi di Seluruh Indonesia". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan* Vol. 12, No. 1 Maret 2008, 91- 117
- Mudrajad Kuncoro. 2000. *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah dan Kebijakan)*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mulyanto. 2001. "Identifikasi dan Analisis Potensi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Eks-Karesidenan Surakarta". *Usul Penelitian Dosen Muda FE UNS Surakarta*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.
- Suparmoko. 1992. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek (Edisi 4)*. Yogyakarta: BPFE.

- Sadono Sukirno. 1995. *Pengantar Teori Makroekonomi (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Sukanto Reksohadiprojo. 2001. *Ekonomika Publik (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPF.
- Safi'i. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik)*. Malang: Averroes Press.
- Sonny Yuwono, Dwi Cahyo Utomo, Suheiry Zein, dan Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)*. Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bandung: Citra Umbara.
- Winarna Surya Adisubrata. 2003. *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi) 1*. Semarang: CV. AnekaIlmu.